

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia organisasi peran pemerintah dalam membangun sektor ekonomi sangatlah penting. Berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian di banyak negara. UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sektor UMKM menjadi agenda utama dalam berbagai kebijakan pembangunan.

Di banyak negara, pemerintah melalui lembaga terkait terus berupaya untuk mengembangkan sektor UMKM. Dukungan yang diberikan meliputi akses permodalan, pelatihan keterampilan, hingga fasilitasi pemasaran. Keberadaan lembaga pemerintah seperti dinas yang menangani UMKM memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan berjalan efektif. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, banyak UMKM akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Kemajuan teknologi juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pemberdayaan UMKM. Digitalisasi telah membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah melalui berbagai programnya terus mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi teknologi ini masih cukup besar, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang pemasaran digital dan manajemen bisnis berbasis teknologi.

Dinas yang menangani UMKM di berbagai daerah di Indonesia memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu pelaku usaha

menghadapi tantangan ini. Dengan menyediakan bimbingan, pelatihan, serta akses terhadap berbagai fasilitas pendukung, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Namun, efektivitas peran dinas ini dalam memberdayakan UMKM masih menjadi pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

UMKM memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Tambunan (2020), UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil dengan modal terbatas serta skala produksi yang relatif kecil. Sedangkan menurut Winarno (2021), UMKM didefinisikan sebagai unit usaha yang memiliki keterbatasan dalam akses keuangan dan teknologi, namun memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Rachman (2022), UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil dengan skala operasi yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha besar, tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar. Sementara itu, menurut Sari (2023), UMKM merupakan usaha yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di negara berkembang karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, menurut Putra (2024), UMKM adalah sektor usaha yang memiliki karakteristik berupa keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi, tetapi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya.

Dinas UMKM sebagai lembaga pemerintah memiliki tugas utama dalam memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap berbagai fasilitas yang diperlukan untuk berkembang. Berbagai program yang dijalankan oleh dinas ini mencakup pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu bertahan dan bersaing di pasar yang semakin dinamis.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan dalam akses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha karena keterbatasan jaminan dan rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, peran dinas UMKM dalam memfasilitasi akses permodalan menjadi sangat krusial. Beberapa program yang telah dijalankan melibatkan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan kredit usaha dengan skema yang lebih ringan dan terjangkau bagi UMKM.

Selain permodalan, pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan dalam hal pengelolaan bisnis dan pemasaran. Banyak UMKM yang memiliki produk berkualitas tetapi menghadapi kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Dinas UMKM berperan dalam memberikan pelatihan terkait strategi pemasaran, branding, hingga penggunaan teknologi digital dalam bisnis. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan UMKM dapat lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Santoso Tahun 2021 Metode Penelitian Kualitatif Judul: "Peran Dinas UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Wirausaha di Kota Semarang" Hasil Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas UMKM di Kota Semarang memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wirausaha. Hasil penelitian mengungkap bahwa program-program yang dilaksanakan oleh dinas, seperti pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan bimbingan teknis, berhasil meningkatkan kapasitas wirausaha lokal. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada peningkatan signifikan dalam jumlah wirausaha baru yang muncul di kota tersebut setelah penerapan program-program ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Dinas UMKM dan institusi pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap berwirausaha. Dengan memanfaatkan potensi SDM yang ada, khususnya generasi muda, kota Semarang berhasil menciptakan peluang usaha yang inovatif dan

berkelanjutan. Namun, tantangan seperti akses terhadap teknologi dan modal tetap menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai oleh program-program Dinas UMKM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aldo Pratama (2020), dengan judul "Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Purbalingga" dengan metode kualitatif, dan penelitian ini menunjukkan hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antarinstansi pemerintah dan rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam program-program yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Purbalingga mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk.

Di Kota Gunungsitoli, UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Banyak masyarakat yang bergantung pada usaha kecil seperti perdagangan, kuliner, dan kerajinan tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah daerah melalui Dinas UMKM berusaha memberikan berbagai program untuk mendukung pengembangan usaha tersebut. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti akses permodalan, pemasaran, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil.

Dinas UMKM di Kota Gunungsitoli memiliki peran strategis dalam menciptakan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat migrasi penduduk keluar daerah serta menekan angka pengangguran. Kondisi UMKM di Kota Gunungsitoli menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan tangan, dengan skala usaha yang masih relatif kecil dan berbasis keluarga. Sebagian besar UMKM

menghadapi keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran modern dan pemanfaatan teknologi digital. Produk-produk lokal sebenarnya memiliki potensi daya saing, namun masih memerlukan penguatan kualitas, inovasi, dan branding agar mampu bersaing dengan produk luar daerah yang masuk ke pasar lokal. Melalui program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, pendampingan pemasaran, dan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan, Dinas UMKM berupaya mendorong pelaku usaha agar lebih mandiri dan produktif. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara lebih optimal.

Dinas UMKM Kota Gunungsitoli telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan, seperti manajemen usaha, pemasaran digital, dan fasilitasi perizinan, untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk mempermudah akses pembiayaan melalui program kredit usaha. Meskipun begitu, beberapa pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan lembaga keuangan. Ke depan, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat agar UMKM dapat berkembang lebih optimal, menjadi pilar pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan sejumlah fenomena yang menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi UMKM di Kota Gunungsitoli. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan dalam mengembangkan bisnis akibat keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, serta minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran modern dan digital. Meskipun Dinas UMKM telah menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendampingan, masih terlihat adanya kesulitan dalam penerapan pengetahuan, terutama pada pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, atau sistem pembayaran elektronik. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 32 pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala berupa modal yang terbatas, akses pasar yang

kurang luas, serta rendahnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran modern dan digital.

Di sisi permodalan, program kredit usaha yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya dimanfaatkan, karena sebagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen yang dianggap rumit. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang kurang mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai program bantuan dan insentif, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat memanfaatkannya secara optimal. Faktor infrastruktur dan lokasi usaha juga memengaruhi perkembangan UMKM, termasuk keterbatasan sarana promosi, akses transportasi, dan fasilitas pemasaran yang strategis. Sementara itu, daya saing produk lokal masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah yang semakin banyak hadir di pasar Kota Gunungsitoli. Kurangnya sinergi dan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah membuat program pemberdayaan seringkali tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, berkesinambungan, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha, agar Dinas UMKM dapat meningkatkan efektivitas perannya dalam mendukung pengembangan usaha kecil di Kota Gunungsitoli. Sehingga Dinas UMKM dalam menciptakan Peluang usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Kota Gunungsitoli dapat mengurangi tingkat migrasi keluar daerah dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul: Analisis Peran Dinas UMKM dalam Memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah memfokuskan hanya membahas tentang Analisis Peran Dinas UMKM dalam Memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Gunungsitoli?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran Dinas UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran Dinas UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana lembaga pemerintah, seperti Dinas UMKM, dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan iklim usaha

yang kondusif. Ini dapat menyumbang pada teori-teori manajemen SDM, terutama dalam konteks lembaga publik dan UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menyediakan dasar yang kuat untuk studi lebih lanjut mengenai peran Dinas UMKM dan potensi SDM dalam konteks lain. Ini dapat menjadi referensi penting untuk penelitian masa depan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan kebijakan pemerintah lokal.

b. Bagi Universitas Nias

Universitas dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan UMKM dan kebijakan publik. Ini juga dapat memperkuat hubungan antara universitas dan pemerintah daerah dalam bentuk kolaborasi penelitian dan pengembangan program.

c. Bagi Lokasi Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Dinas UMKM di Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kebijakan dan program yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam menciptakan iklim peluang usaha dan memanfaatkan potensi SDM lokal. Ini juga bisa membantu dalam perencanaan strategi pengembangan ekonomi daerah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran lembaga pemerintah dalam mendukung UMKM. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan yang ada, atau membandingkan dengan studi di daerah lain untuk menemukan pola atau perbedaan yang signifikan.